

**EVALUASI KEBIJAKAN PEMBERIAN PEMBEBASAN ATAS  
POKOK DAN SANKSI ADMINISTRATIF (PEMUTIHAN)  
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI SUMATERA BARAT**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Syarat Mendapatkan Gelar Sarjana Administrasi Publik  
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas*

**OLEH**



**Dibimbing oleh:**

**Muhammad Ichsan Kabullah S.IP, M.PA**

**Annisa Aulia Putri, S.AP., M.AP**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK**

**DEPARTEMEN ADMINISTRASI PUBLIK**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**2026**

## ABSTRAK

**Zakia Retaf, 2210842034, Evaluasi Kebijakan Pemberian Pembebasan Atas Pokok dan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Sumatera Barat, Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang 2026. Dibimbing Oleh Muhammad Ichsan Kabullah S.IP, M.PA dan Annisa Aulia Putri, S.AP., M.AP. Skripsi ini terdiri dari 134 Halaman dengan referensi 15 buku, 9 jurnal dan 3 laporan instansi.**

Salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah yang memberikan kontribusi terbesar terhadap Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah Pajak Kendaraan Bermotor. Dalam upaya optimalisasi penerimaan daerah dan mengurangi beban masyarakat yang memiliki tunggakan, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat secara konsisten memberikan berbagai bentuk keringanan Pajak Kendaraan Bermotor setiap tahun. Namun demikian, jumlah kendaraan yang menunggak pajak masih menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun, bahkan meningkat sebesar 15,8 persen dalam kurun waktu 2023–2025. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana kebijakan pembebasan atas pokok dan sanksi administratif Pajak Kendaraan Bermotor mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi Kebijakan Pemberian Pembebasan Atas Pokok dan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor (Pemutihan) di Provinsi Sumatera Barat, menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Adapun untuk keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber. Penelitian ini menggunakan teori kriteria evaluasi kebijakan dari William N Dunn yang terdiri dari efektivitas, efisiensi, kecukupan, keadilan, responsivitas dan ketepatan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pemberian pembebasan atas pokok dan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor di Provinsi Sumatera Barat cukup berhasil dalam tujuan jangka pendek (meningkatkan pembayaran, mengurangi beban masyarakat), tetapi belum berhasil menyelesaikan masalah tunggakan secara berkelanjutan, dan berisiko menciptakan ketergantungan masyarakat pada kebijakan keringanan berulang sehingga perlu dilaksanakan lebih selektif, tidak rutin tiap tahun, dan disertai strategi peningkatan kepatuhan jangka panjang.

**Kata Kunci : *Pajak Kendaraan Bermotor, Evaluasi, Pemutihan, Pembebasan Atas Pokok dan Sanksi Admiinistratif.***

## ABSTRACT

**Zakia Retaf, 2210842034, Evaluation of the Policy on the Exemption of Principal and Administrative Sanctions for Motor Vehicle Tax in West Sumatra Province, Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Andalas, Padang 2026. Supervised by Muhammad Ichsan Kabullah, S.IP., M.PA and Annisa Aulia Putri, S.AP., M.AP. This thesis consists of 134 pages with 15 book references, 9 journal references, and 3 institutional reports.**

One of the main sources of Locally-Generated Revenue that provides the largest contribution to the West Sumatra Provincial Government is the Motor Vehicle Tax. In an effort to optimize regional revenue and reduce the burden on taxpayers with outstanding arrears, the West Sumatra Provincial Government has consistently provided various forms of Motor Vehicle Tax relief every year. However, the number of vehicles with tax arrears continues to show an increasing trend from year to year, even rising by 15.8 percent over the 2023–2025 period. This condition raises questions regarding the extent to which the policy on the exemption of principal and administrative sanctions for Motor Vehicle Tax has been able to achieve its established objectives.

This research aims to evaluate the Policy on the Exemption of Principal and Administrative Sanctions for Motor Vehicle Tax (Tax Amnesty/Pemutihan) in West Sumatra Province, using a descriptive qualitative method with data collection techniques through interviews and documentation. Data validity was ensured through source triangulation techniques. This research applies William N. Dunn's policy evaluation criteria theory, consisting of effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and appropriateness.

The results of this research indicate that the policy on the exemption of principal and administrative sanctions for motor vehicle tax in West Sumatra Province has been reasonably successful in achieving its short-term objectives (increasing tax payments and reducing the burden on the community), but has not yet succeeded in resolving the issue of tax arrears sustainably, and carries the risk of creating public dependency on recurring relief policies. Therefore, the policy needs to be implemented more selectively, rather than routinely every year, and should be accompanied by a long-term compliance-improvement strategy.

**Keywords: *Motor Vehicle Tax, Evaluation, Tax Amnesty, Exemption of Principal and Administrative Sanctions***